

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian oral
Comprehensive strata I pada fakultas ekonomi dan ilmu sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RINDU ANNISA
11775201709

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021**


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RINDU ANNISA
NIM : 11775201709
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
(IPAL) DI KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

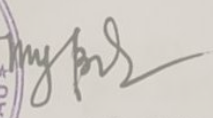
NIP. 19781025 200604 1 002

Dekan

Ketua Jurusan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Dr. H. Sahyarni, Se,MM

NIP. 19700826 199903 2 001


DR. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RINDU ANNISA
NIM : 11775201709
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DI
KOTA PEKANBARU

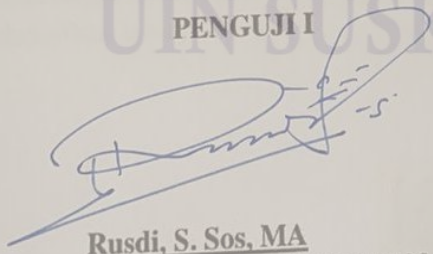
Disetujui oleh,

KETUA PENGUJI

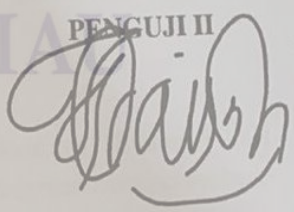

Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui,

PENGUJI I


Rusdi, S. Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II


Irdavanti, S.IP.MA
NIK. 130 411 030



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindu Annisa
 NIM : 11775201709
 Tempat/Tgl.Lahir : Rawang Lama, 11 Oktober 1999
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Rindu Annisa

NIM: 11775201709



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Kota Pekanbaru

Oleh

Rindu annisa

Nim : 11775201709

Email: rinduannisa9@gmail.com

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang belum maksimal koordinasi pembangunan IPAL, kurangnya tingkat kehadiran OPD dalam rapat koordinasi, sering terlambatnya OPD dalam mengusulkan laporan kemajuan kerja, rapat koordinasi dalam pembangunan IPAL yang masih kurang efektif dan kurang maksimalnya OPD dalam menjalankan peran dalam pelaksanaan pembangunan IPAL. Tujuan penelitian untuk mengetahui koordinasi pada pelaksanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Pekanbaru, dan hambatan hambatan apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan. Metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan data primer data sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel serta jurnal untuk mengakses data dan informasi terkini yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan. Key informan dalam penelitian ini BAPPDA kota Pekanbaru, Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) kesatuan tindakan, 2) komunikasi, 3) pembagian kerja, 4) disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum efektif sesuai dengan keempat indikator ini belum sepenuhnya tercapai sehingga berdampak pada koordinasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah di kota Pekanbaru. Dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah ini koordinasi tidak dapat berjalan dengan baik karena masih kurangnya tingkat kesadaran organisasi perangkat daerah terhadap tanggung jawab yang telah ditetapkan dan kurangnya peran koordinator yang tegas dalam pembangunan IPAL di kota Pekanbaru. Penting juga dalam melaksanakan pembangunan diperlukan nya koordinasi yang efektif dan melibatkan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan IPAL yang mampu berkerja sama yang baik dalam pelaksanaan pembangunan IPAL, agar pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kota Pekanbaru berjalan maksimal.

Kata Kunci: Administrasi pembangunan, koordinasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahiwabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang dhaif ini bisa selalu istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beserta salam mari kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihiwasalam, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspirasi bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita dihari perhitungan kelak.

Pembuatan Proposal ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun proposal penulis yang berjudul: **“Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Kota Pekanbaru”**.

Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Khairunnas Rajab ,M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Hj.Dr. Mahyarni, SE, MM selaku dekan fakultas ekonomi dan ilmu social UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba,S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau
4. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau
5. Ibu Vigna Museliza,SE, M.Si selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menempuh perkuliahan.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
7. Kepada orang tua saya Bapak Nurmansyah dan Ibu Mahdaleni yang selalu mendoakan saya,dan memberikan semangat dalam megapai cita cita saya, serta adik adik saya yang selalu mendukung saya.
8. Terimakasih kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru ,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan ,dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang telah mengizinkan dan membantu saya dalam melakukan penelitian.
9. Rekan rekan seperjuangan dan sahabat saya , Nurulfadilah, Randa syahputra, M.Taufik, Muhammad Jefri, dan Iryanda aditama, selama penulisan skripsi
10. Untuk rekan rekan singgelillah yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi
11. Untuk Riyansyah yang selalu memberi saya semangat dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman jurusan administrasi negara lokal D angkatan 2017 yang sama sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu member semangat dalam penyusunan skripsi.

13. Teman–temen Maduan squad , Irma dan Wildan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulisan berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua.Amiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

Rindu annisa
1177502709

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Batasan Penelitian	12
1.6 Sistematika Penelitian	13
BAB II KERANGKA TEORI	15
2.1 Administrasi Pembangunan.....	15
2.1.1 Defenisi Administrasi pembangunan	15
2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan	17
2.1.3 Perencanaan pembangunan daerah	17
2.1.4 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	19
2.2 Koordinasi	22
2.2.1 Defenisi Koordinasi	22
2.2.2 Ruang Lingkup Koordinasi	25
2.2.3 Tipe-Tipe Koordinasi	26
2.2.4 Fungsi Koordinasi	27
2.2.5 Ciri-Ciri Koordinasi	29
2.2.6 Pentingnya Peningkatan Koordinasi	30
2.2.7 Faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi	32
2.3 Pandangan Islam Tentang Koordinasi	36
2.4 Penelitian Terdahulu	38
2.5 Defenisi konsep	41
2.6 Konsep Operasional	42
2.7 Kerangka Berpikir	44
BAB III METODELOGI PENELITIAN	45
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
3.2 Jenis Dan Sumber Data	45
3.2.1 Jenis.....	45
3.2.2 Sumber Data.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3	Teknik Pengumpulan Data	46
3.4	Informan Penelitian	47
3.5	Teknik Analisa Data	48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Kota Pekanbaru	51
4.1.1	Gambaran Geografis	51
4.1.2	Jumlah Penduduk.....	52
4.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru (Bappeda)	53
4.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).....	55
4.4	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	58
4.5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	60

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1	Koordinasai Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kota Pekanbaru	63
5.2	Faktor-faktor Penghambat Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan IPAL Di Kota Pekanbaru	83
5.2.1	Faktor Internal	83
5.2.2	Faktor Eksternal.....	84

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan.....	85
6.2	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Dokumentasi Penelitian

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah penduduk di kota Pekanbaru.....	5
1.2 Data Perangkat Organisasi Daerah	8
1.3 Pembagian Kerja Perangkat Organisasi Daerah	9
1.4 Data Daftar Nama Jalan	10
3.1 Informan Penelitian Ini	48
4.1 Jumlah penduduk Pekanbaru 2000-2020.....	53
5.1 Data permasalahan pembangunan IPAL.....	65
5.2 Pembangian kerja OPD	70

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Profil Pembangunan IPAL.....	7
5.1 Gambar Rapat Online Pelaksanaan Pembangunan IPAL.....	77



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Program KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan instrument yang relative baru dikembangkan sebagai penguatan program untuk menyusun rumusan kebijakan rencana program berorientasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal itu mengacu pada pertumbuhan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya alam dan kemampuan institusi masyarakat didalam melaksanakan pembangunan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang merupakan dasar didalam menyusun program program pembangunan. Disamping itu pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan.

Salah satu permasalahan lingkungan yang perlu diatasi di Kota pekanbaru adalah air limbah. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota padat penduduk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Peningkatan penduduk dan permukiman yang padat ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang merupakan suatu persyaratan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Di Pekanbaru

Tahun	Jumlah Penduduk(orang)
2007	779.899
2008	799.213
2018	1.038.415
2019	1.090.559
2020	1.117.605
2021	1.145.322

Sumber BAPPEDA Kota Pekanbaru

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat peningkatan penduduk yang terus meningkat dan membuat keterbatasan lahan, pada umumnya masyarakat membangun septik tank kurang dari 10 meter dari sumur air tanah, dan septiktank yang dibangun tidak kedap (rembes). Septiktank yang tidak kedap dan dekat dengan sumur air tanah dapat menyebabkan terkontaminasinya air tanah oleh bakteri patogen dari tinja yang dapat menimbulkan penyakit. Tanpa pengembangan infrastruktur sanitasi yang memadai, dapat menyebabkan masalah jangka pendek seperti menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, serta masalah jangka panjang seperti pencemaran lingkungan yang akan sulit direvitalisasi. Masuknya air limbah langsung ke badan air tanpa diolah terlebih dahulu menyebabkan pencemaran pada badan air yang berakibat pada menurunnya kualitas badan air.

Pengolahan air limbah domestik merupakan salah satu persyaratan kesehatan perumahan dalam Kepmenkes No. 892 Tahun 1999. Salah satu



aspeknya yaitu air limbah yang berasal dari rumah tidak boleh mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk mengolah air limbah sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan. Pendekatan dalam mengolah air limbah domestik adalah cara terpadu menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Sistem pengolahan yang dilakukan adalah air limbah dikumpulkan dan diolah secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan. Air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama atau terpusat (Kepmen.LH No. 112 Tahun 2003). Proses pembangunan IPAL komunal dilakukan melalui konsep pembangunan berbasis masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pembangunan, pengoperasian dan perawatan. Dalam pembangunan dan pengoperasian sarana pengolahan air limbah, biasanya dibentuk lembaga pengelola di tingkat masyarakat yang beranggotakan masyarakat pengguna layanan (Afandi, 2013)

Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Sistem PLP Provinsi Riau Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Program Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) Kota Pekanbaru, atau dengan kata lain Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T). Pekerjaan ini merupakan sistem pengolahan air limbah domestik, dari rumah-rumah warga secara kolektif (jaringan perpipaan), ke sub sistem pengolahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpusat (IPAL), untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan (sungai).

Fokus utama programpembangunan ini, mendukung program pemerintah Kota Pekanbaru, dalam rangka mengurangi pencemaran air tanah dari limbah domestik, yang semakin mengkhawatirkan. Ini seiring dengan bertambahnya pemukiman penduduk di Kota Pekanbaru. Manfaat jangka panjangnya penggalian ini, akan terpenuhinya ketersediaan sanitasi yang bersih, dan tersedianya sumber air tanah yang layak konsumsi, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Gambar 1.1
Profil Pembangunan IPAL (Instalasi Perpipa-an Air Limbah)

INFORMASI PROYEK – PAKET SC 1	
o Nama Proyek	: Pembangunan Perpipa-an Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan (Paket SC-1)
o Nama Kontraktor	: PT Wijaya Karya – Karaga KSO
o Kontrak Nomor	: HK.02.03/FISIK.SC1/PSPLPR-PPK.II/XI/2018/01
o Waktu Pelaksanaan	: 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender
o Waktu Pemeliharaan	: 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender
o Tanggal Kontrak	: 01 Nopember 2018
o Tanggal SPMK	: 09 Nopember 2018
o Tanggal Selesai Konstruksi	: 27 Desember 2020
o Sumber Dana	: APBN T.A 2018 s.d 2020

INFORMASI PROYEK – PAKET SC 2	
o Nama Proyek	: Pembangunan Perpipa-an Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan (Paket SC-2)
o Nama Kontraktor	: PT Hutama Karya – Rosa Lisca KSO
o Kontrak Nomor	: HK.02.03/FISIK.SC-2/PSPLPR-PPK.II/XI/2018/02
o Waktu Pelaksanaan	: 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender
o Waktu Pemeliharaan	: 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender
o Tanggal Kontrak	: 01 Nopember 2018
o Tanggal SPMK	: 09 Nopember 2018
o Tanggal Selesai Konstruksi	: 27 Desember 2020
o Sumber Dana	: APBN T.A 2018 s.d 2020

Sumber rapat bulanan LMPU Februari 2020 bappeda kota pekanbaru

Instalasi perpipa-an air limbah (IPAL) di rencanakan pada Dokumen Lingkungan,AMDAL (IPLT dan IPAL) yang dibuat Tahun 2013,Dikarenakan Dokumen AMDAL harus direvisi karena ada perubahan desain, Dinas



Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat No. 660/DLHK/TL/664 tertanggal 24 September 2018. Tanggal 28 Desember 2018; Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL No. 660/DLHK/UKL-UPL/37/2018. Saat ini Dokumen UKL-UPL dalam proses revisi karena rencana pengelolaan jaringan pipa paket NC belum seluruhnya masuk dalam Dokumen UKL-UPL tsb. Dokumen UKL-UPL untuk Paket Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) masih dalam proses pengerjaan. Pembangunan instalasi perpipaan air limbah ini di mulai pada tahun 2018 dan siap di akhir 2020 karena ketidaksiapan perencanaan pembangunan ini maka pembangunan ini tidak selesai di akhir 2020 . Program pembangunan IPAL merupakan program metropolitan sanitation management project (MSMIP), yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan air limbah domestik.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan instalasi perpipaan air limbah (IPAL) memiliki beberapa organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan pembangunan IPAL.

Tabel 1.2
Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Badan perencanaan pembangunan daerah kota pekanbaru
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru
3	Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru
4	Dinas perhubungan Kota Pekanbaru

Sumber: Bappeda 2020

Dari tabel 1.2 dapat dilihat pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan instalasi perpipaan air limbah. Organisasi perangkat daerah tersebut memiliki tanggung jawab tugas masing masing dalam perencanaan pembangunan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IPAL, tanggung jawab setiap OPD yang di berikan sesuai wewenang yang di miliki untuk mencapai tujuan perencanaan pembangunan. Agar tercapainya tujuan perencanaan pembangunan IPAL setiap wewenang OPD memiliki keterkaitan satu sama lain, maka seharusnya setiap OPD harus menjalankan wewenang dan saling mendukung untuk perencanaan terealisasi dengan baik sesuai dengan yang disosialisasi dengan masyarakat.

Tabel 1.3
Pembagian Kerja Setiap OPD

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Peran terkait perencanaan pembangunan IPAL
1.	BAPPEDA Kota Pekanbaru	Menyusun kebijakan dan perencanaan prasarana pembangunan IPAL , dan berkoordinasi dengan OPD yang terkait
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi ijin dan sebagai penanggung jawab pembangunan ipal 2. Mengawasi berjalannya pembangunan ipal 3. Melakukan pendekatan atau bersosialisasi kepada masyarakat bersama rt, rw dan unsur kelurahan tentang pembangunan IPAL
3.	Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab mengawasi dan menangani limbah dari pembangunan IPAL , agar tidak mencemari lingkungan 2. Berkoordinasi dengan kontaktor tentang tempat pembuangan limbah dan jadwal pembungan agar tidak terjadinya limbah yang berserakan
4.	Dinas perhubungan Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rambu rambu sesuai yang dibutuhkan agar tidak terjadi nya kecelakaan kerja 2. Mengatur lalu lintas sekitar pembangunan

Sumber BAPPEDA 2020

Dari tabel 1.3 dapat kita lihat setiap OPD memiliki pembagian kerja



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masing-masing yang sesuai dengan wewenang setiap bidang OPD. Terbaginya kerja setiap OPD secara bidang dinas agar teralisasinya perencanaan pembangunan secara baik. Kenyataannya dalam hasil observasi pada tanggal 12 februari 2020, pada rapat bulanan LPMU bulan dua tokoh masyarakat mengatakan OPD tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan peranan dalam pembangunan IPAL, dikarenakan kurangnya koordinasi yang dilakukan OPD yang terkait sehingga tugas tidak berjalan dengan baik, dapat dilihat di lapangan masih banyak rambu-rambu yang tidak layak dengan pembangunan, rambu-rambu hanya diberikan seadanya, jalan yang rusak dan menyebabkan kemacetan. Pembangunan IPAL merupakan pembangunan bersekala besar yang memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan lingkungan. Seharusnya Dinas Perhubungan memberi rambu-rambu yang sesuai dengan pembangunan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja.

Tabel 1.4
Daftar Jalan Yang Terdampak Pembangunan IPAL

No	Nama Jalan	No	Nama Jalan
1	Jln. Ahmad dahlan	19	Jln. Kusuma
2	Jln. Kuau	20	Jln. Teladan
3	Jln. Balam	21	Jln. Dagang
4	Jln. Tiaug	22	Jln. Nenas
5	Jln. Kaswari	23	Jln. Tanjung
6	Jln. Kakatua	24	Jln. Mualim 2
7	Jln. Merak	25	Jln. Putri nilam
8	Jln. Bangau	26	Jln. Putri malu
9.	Jln. Ketitiran	27	Jln. Cendrawasih
10	Jln. Bayan	28	Jln. Semangka
11	Jln. Belibis	29	Jln. Pelajar 1
12	Jln. Sawai	30	Jln. Mangga I,II,II dan IV
13	Jln. Ababil	31	Jln. Langsat
14	Jln. Nuri	32	Jln. Rahmat
15	Jln. Durian	33	Jln. Amal
16	Jln. Pepaya	34	Jln. Amal 3
17	Jln . Teratai	35	Jln. Panda
18	Jln. Kuda laut	36	Jln. Zebra



Sumber BAPPEDA kota Pekanbaru 2020

Pada table 1.4 dapat dilihat jalan yang terdampak dari pembangunan IPAL, dari hasil observasi saya pada tanggal 24 Januari 2021 terdapat beberapa jalan yang rusak parah dan meresahkan masyarakat. Padahal dalam sosialisasi kepada masyarakat setiap jalan yang terdampak pembangunan IPAL akan dilakukan pengaspalan kembali, kenyataan banyaknya galian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Pekanbaru, mengakibatkan terjadinya kerusakan ruas jalan. Bahkan bekas galian IPAL tersebut belum juga dilakukan perbaikan atau pengaspalan seperti semula. Bekas galian IPAL itu juga membuat permukaan jalan menjadi tidak rata, apalagi pada saat malam hari dengan kondisi jalan yang demikian tentunya semakin rawan terjadinya kecelakaan khususnya pengendara sepeda motor.

Pada rapat LPMU bulan Feb 2020 tokoh masyarakat juga mengeluhkan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti fungsi dari pembangunan IPAL ini kedepannya, sehingga masyarakat masih menolak pembangunan ini, dalam pernyataan tokoh masyarakat ini dapat kita lihat kurangnya sosialisasi Dinas PUPR kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa pembangunan ini sangat merugikan, dan masyarakat juga mengeluhkan limbah yang disebabkan oleh pembangunan tersebut yang menyebabkan banjir, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan seharusnya membuat perencanaan tentang limbah yang dihasilkan pembangunan IPAL. Tidak telaksananya kinerja yang baik setiap OPD tersebut dikarenakan kurangnya efektifnya koordinasi antar OPD dalam pembangunan IPAL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rapat Lpmu (*local product manajemen unit*) salah satu rapat perencanaan pembangunan IPAL yang dilakukan sebulan sekali oleh OPD yang terlibat dalam pembagunan IPAL. Rapat LPMU ini merupakan salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan OPD dalam perencanaan pemabangunan IPAL, dalam rapat tersebut dapat dilihat kurang efektifnya rapat yang dilakukan OPD. Masih adanya OPD yang terlambat datang ke rapat sehingga tidak terjadi nya komunikasi yang baik antara OPD atau pihak kontraktor yang bertanggung jawab. Seharunya OPD mampu meningkatkan kedisiplinan sehingga rapat dapat berjalan efektif. OPD memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan, jika mereka tidak berkerja sama dengan baik maka tujuan dari pembangunan IPAL ini tidak teralisasiikan .

Maka harus terjalinnya koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan IPAL,jika dalam organisasi harus terdapat *the principle of coordination* (asas koordinasi), maka di dalam koordinasi sendiri harus memiliki *sens of cooperation* yaitu perasaan untuk bekerjasama. Mustahil dalam sebuah organisasi dapat tercipta koordinasi yang baik, jika orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki rasa untuk saling berkerja sama antara bagian yang satu dan lainnya.Setelah adanya koordinasi dalam suatu oraganisasi akan menciptakan hubungan tim kerja yang solid sehingga mampu berkolaborasi dalam merumuskan pembaharuan organisasi, sebab tanpa kualitas kerjasama tim maka sebuah organisasi dapat berjalan lambat dan justru tergerus arus perubahan yang berjalan kencang. Untuk membuat koordinasi dalam organisasi dapat berlangsung dengan baik. Maka dibutuhkan adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerjanya masing-masing. Sehingga dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dapat menghindari kesimpangsiuran dan juga tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab di dalam satu bagian dan bagian yang lainnya dalam sebuah organisasi. Namun di dalam penerapan koordinasi ini ada beberapa fenomena – fenomena yang dihadapi OPD yaitu :

1. Masih kurangnya tingkat kehadiran OPD dalam rapat koordinasi . Otomatis hal tersebut dapat menghambat proses koordinasi OPD dalam menyusun perencanaan pembangunan di kota Pekanbaru, dan dalam rapat koordinasi sering di temui yang hadir hanya perwakilannya.
2. Sering terlambatnya OPD dalam mengusulkan laporan kemajuan kerja yang tentunya ini akan menghambat koordinasi antar OPD
3. Rapat yang dilakukan kurang efektif, dapat dilihat jadwal rapat yang dilakukan tidak terjadwalkan, yang menyebabkan perencanaan pembangunan tidak terencana dengan baik.
4. Masing- masing OPD kurang maksimal dalam menjalankan peran dalam pelaksanaan pembangunan IPAL

Masih rendahnya kordinasi kerja tersebut, penulis menduga disebabkan salah satunya masih rendahnya kinerja OPD dalam perencanaan pembangunan, yang memerlukan ketepatan metoda analisis, ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Berdasarkan kondisi objektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan pembangunan di kota Pekanbaru perlu diperkuat agar dapat memastikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian tentang kordinasi antar OPD dalam pembangunan IPAL, mempertimbangkan bahwa pentingnya koordinasi kinerja pada organisasi yang sesuai dengan arah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas dan mengingat pentingnya akan adanya atau dilaksanakannya suatu koordinasi, maka bersama dengan itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang , maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Koordinasi pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah di kota pekanbaru?
2. Apa saja hambatan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah di kota pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Koordinasi Pada pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah di kota pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui hambatan yang mempengaruhi Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah di kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan pendeskripsian tentang analisi koordinasi badan perencanaan pembangunan daerah dengan opd pada di kota pekanbaru. hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang keberhasilan koordinasi OPD untuk keberhasilan pembangunan IPAL di pekanbaru yang mensejahterakan masyarakat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan pengembangan koordinasi badan perencanaan Kota Pekanbaru dengan OPD kota atau kabupaten lainnya. Hasil penelitian ini mengidentifikasi penjelasan keberhasilan suatu koordinasi dalam pembangunan kota Pekanbaru, sehingga penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan memperbaiki pengkoordinasian dalam pembangunan di Kota Pekanbaru agar di terapkan dengan baik .

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan agar penelitian berfokus pada apa yang diteliti. Penjelasan yang tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, maka peneliti membuat batasan penelitian sebagai berikut :

1. Pada analisa ini penelitian ini memfokuskan pada koordinasipelaksanaan pembangunan IPAL kota Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam mempermudah memahami penulisan proposal penelitian ini maka penulis memberi gambaran dari rencana penulisan melalui sistematika penulisan. Penulisan dibagi dibagi ke dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis mengawali penelitian yang dimulai dari latar belakang penelitian, Identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang konsep atau teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan tentang koordinasi.

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek atau tempat penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang

dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Administrasi Pembangunan

2.1.1 Defenisi Administrasi pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian s. p., 2008).The liang gie dalam (Pasalong, 2011) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

(Pasalong, 2011) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.



Pembangunan menurut (Siagian s. p., 2009) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (*nation-building*). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Jadi Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Menurut (SondangSiagian, 2009) mendefinisikan administrasi pembangunan: “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan negara akhirnya”. Sedangkan menurut Bintoro AP adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan. Saat menelaah administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu dibedakan, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi.

- a. Administrasi bagi pembangunan adalah administrasi dari dan bagi pembangunan, dimana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena bersangkutan dengan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, manajemen pembangunan tersebut meliputi,; 1). Perencanaan pembangunan ,2) Pengerahan sumber daya dan 3). Anggaran
- b. Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi, adalah perubahan sikap birokrasi

2.1.3 Perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Oleh karena itu, ukuran-ukuran dibawah ini perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan realisasi tahunan.

2. Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD.
3. Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan

(Riyadi dan Bratakusuma , 2004) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah adalah kestabilan politik dan keamanan dalam negeri, dilakukan oleh ahli di bidangnya, realistis sesuai dengan kemampuan dana, koordinasi yang baik, top down dan bottom up planning, sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus serta transparansi dan dapat diterima masyarakat.

2.1.4 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses pembangunan dapat di bagi menjadi empat proses (permendagri 54/2010) yaitu :

1. Proses Teknokratika

Perencanaan yang di lakukan oleh perencanaan profesional , atau oleh lembaga /unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Pendektan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan a, menggunakan metode dan krangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan krangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis,data dan informasi yang akurat, serta dapat di pertarungkan jawaban. Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lan dapat digunakan untuk :

- a. Me-review menyeluruh kinerja pembangunan daerah priedode yang lalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merumuskan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah masa kini.
 - c. Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah.
 - d. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah
 - e. Memproyeksi kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.
 - f. Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja
 - g. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program /kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan spm.
 - h. Memproyeksi pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya
 - i. Menetapkan skpd penanggung jawab pelaksana, pengendali dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
2. Proses partisipatif

Perencanaan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder) antara lain melalui pelaksanaan Musrembang pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan.

- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan
- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa
- d. Keterwakilan seluruh sekmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutan gender.
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- f. Terciptanya konsesus atau kesepakatan pada semua tahapan pentingnya pengambilan keputusan ,seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan. Perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

3. Proses politik

Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi,misi dan program yangdi tawarkan presiden/kepala daerah terpilih selama kampanye. Pendekatan politis dimaksudkan bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD ,melalui:

- a. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan strategi , kebijakan dan program pembangunan daerah selama jabatan.
- b. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum,teknik penyusunan,singkronisasi,dan sinergi pencapaian sasaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunannasional dan pembangunan daerah

- c. Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintahan untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
4. Proses buttom-up dan top-up

Perencanaan yang aliran proses dari atas kebawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan.pendekatan perencanaan pembangunan daerah bahwa atas(*buttom-up*)san atas bawah (*top-down*),hasilnya selaras melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa,kecamatan,kabupaten/kota , provinsi dan nasional, sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan pembangunanderah.

2.2 Koordinasi

2.2.1 Defenisi Koordinasi

Organisasi adalah sekumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama dan terdiri dari tiga unsur yang saling berhubungan yaitu: sekelompok manusia, kerjasama dan tujuan yang melandasi dari berdirinya sebuah organisasi. Untuk mewujudkan tujuan dari organisasi dan agar tujuan tersebut organisasi itu tercapai secara maksimal dan efisien, maka dibutuhkan adanya koordinasi. Koordinasi adalah usaha sistematis yang mengusahakan keselarasan, keseimbangan antara pekerjaan seseorang dengan orang lain, antara bagian satu dengan bagian yang lain. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran, ketidaktepatan dalam bekerja bersama-sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Ndraha, 2003) berpendapat koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003).

(G.R. Terry, 2004) berpendapat bahwa, koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut Handyningrat Koordinasi yaitu usaha penyesuaian dari bagian-bagian yang berbeda agar aktivitas dari setiap bagian tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

(Sughanda, 1991) koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan



pencapaian dengan efisien. (Siagian, 2001) menyatakan, bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang menyatukan berbagai kegiatan yang saling berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan. Sasaran utama koordinasi adalah untuk menciptakan “unity action” yang pada gilirannya akan menjamin keterpaduan pelaksanaan dan sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerjasama komponen yang terlibat.

Menurut (Yahya yohenes, 2002) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Leonard D. White maksudnya koordinasi adalah penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Dengan demikian unsur koordinasi bagi Leonard D. White adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian diri (*Adjustment*)
2. Pengoperasian (*operator*)
3. Waktu (*time*) yang cocok
4. Sumbangan terbanyak (*maximum contribution*)
5. Hasil (*Product*)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat sangat diperlukannya koordinasi dalam suatu organisasi untuk menjalankan setiap tugas dan wewenangnya. Seseorang pemimpin harus dapat menciptakan keharmonisan dengan bawahannya agar terciptanya kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



organisasi. Dengan koordinasi ini diharapkan terciptanya keselarasan kerja antara organisasi agar tidak adanya konflik di dalam organisasi. Hal ini berarti mampu membuat kerja secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan, kerjasama antar institusi atau unit terkait, penyesuaian bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan dari tiap bagian – bagian dapat terlaksana secara maksimal dan terealisasi dalam satu kesatuan tindakan. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

2.2.2 Ruang Lingkup Koordinasi

Suatu organisasi memiliki batasan batasan dalam suatu koordinasi terhadap bawahannya. Adapun ruang lingkup koordinasi menurut (George R. Terry, 1964) mengemukakan dalam bukunya “*Principles of Management*”, ruang lingkup koordinasi antara lain:

- a. Koordinasi Dalam Individu, Apabila dilihat dari sisi manajemen organisasi, koordinasi individu bisa saja masuk dalam urusan setiap individu dan tidak berhubungan langsung dengan manajemen organisasi atau perusahaan. Tetapi keahlian setiap individu dalam mengatur dan merampungkan tanggung jawab dari organisasi akan mempunyai dampak terhadap berhasilnya dalam mencapai tujuan pribadi.
- b. Koordinasi Antara Individu Dari Suatu Kelompok, Ini bisa dilihat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sama tim dalam suatu organisasi atau dalam permainan olah raga. Tanpa adanya koodinasi yang baik akan sangat mustahil suatu tim meraih tujuannya. Koordinasi antar individu di suatu kelompok diterapkan dengan suatu pembagian tugas dan saling melakukan komunikasi untuk membentuk sinergitas. Melalui koordinasi maka tidak akan terjadi misleading dalam mencapai tujuan. Suatu organisasi memiliki batasan batasan dalam suatu koordinasi terhadap bawahannya.

- c. Koordinasi Antara Kelompok Pada Suatu Perusahaan, Dalam suatu organisasi atau perusahaan sering terjadi koordinasi antara kelompok yang dimaksudkan sebagai divisi/unit/departemen. Antar divisi saling menjalan koordinasi supaya tidak terjadi tumpang tindih aktivitas atau program yang akan dijalankan. Koordinasi antar unit juga dilakukan sebagai penyelarasan langkah dalam mencapai tujuan.
- d. Koordinasi Antara Perusahaan Dan Berbagai Macam Peristiwa Dunia, koordinasi dengan pihak luar (eksternal) dibutuhkan dalam melaksanakan manajemen perusahaan. Kegiatan yang dijalankan organisasi secara menyeluruh diusahakan harus sesuai dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah seperti perusahaan lain yang didalamnya juga termasuk pesaing, peraturan legal pemerintah, kondisi ekonomi dan politik, dan juga berbagai peristiwa yang terjadi di dunia.

2.2.3 Tipe-Tipe Koordinasi

Suatu organisasi memiliki tipe koordinasi yang pilih sesuai dengan kebutuhan atau di kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan



tugas untuk mencapai tujuan dengan baik. Menurut (Inu Kencana, 2011) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan Bentuk Koordinasi adalah :

- a. Koordinasi Horizontal, Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- b. Koordinasi Vertikal, Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.
- c. Koordinasi Fungsional, koordinasi fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

2.2.4 Fungsi Koordinasi

Perlu adanya koordinasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan dalam suatu organisasi, maka koordinasi memliki fungsi dalam suatu organisasi adapun fungsi koordinasi Menurut (Handayaniingrat , 1989) adalah sebagai berikut :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.
- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan. yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
- f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.
- g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas.

Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.2.5 Ciri-Ciri Koordinasi

Menurut (Handyaningrat , 1991) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaik-baiknya.

- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja. Universitas

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan

2.2.6 Pentingnya Peningkatan Koordinasi

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi, tetapi semakin besar derajat spesialisasi maka semakin sulit bagi manajer untuk



mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda. *Lawrence* dan *Lorch* telah mengemukakan empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja diantara bermacam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif, yakni :

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu
2. Perbedaan dalam orientasi waktu
3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi
4. Perbedaan dalam formalitas struktur

Selain itu, komunikasi merupakan kunci dari koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyerahan dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan maka semakin membutuhkan informasi, untuk itu, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi. Ada tiga mekanisme pengkoordinasian dasar untuk pencapaian koordinasi yakni :

1. Hirarki manajerial ; rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2. Atauran dan prosedur ; aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rencana dan penetapan tujuan ; pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi

2.2.7 Faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi

(Hasibuan, 2006), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

- a. Kesatuan Tindakan, pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.
- b. Komunikasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi yang satu ke generasi yang lain. Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

- c. Pembagian Kerja Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

- d. Disiplin, pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi hādala usa penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masingmasing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. (Rivai , 2005) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku”. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

2.3 Pandangan Islam Tentang Koordinasi

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”(surah al-saff ayat 4)

Maksud dari surah al- shaff disitu menurut al-Qurtubi adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan (organisasi) supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Seperti yang kita ketahui koordinasi menurut (G.R. Terry, 2001) berpendapat bahwakoordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Seseorang pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan baik oleh bawahannya agar dapat mengarahkan bawahannya untuk menyatu padukan menghubungkan dan menyelaraskan hubungan antar orang-orang pekerjaan-pekerjaan dan satuan-satuan organisasi yang satu dengan yang lain sehingga semuanya berjalan harmonis. Melalui koordinasi yang baik maka pembagian pekerjaan akan lebih jelas dan sesuai dengan bidang-bidang yang telah di tentukan. sehingga bawahan tidak bingung dalam menjalankan tugas-tugas yang akan di kerjakan, dan tidak akan muncul keraguan pada bawahan yang menyebabkan salah persepsi dalam melaksanakan pekerjaannya.



Sudah seharusnya pemimpin menumbuhkan koordinasi yang baik dalam suatu organisasi, koordinasi salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi, karena tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tergantung koordinasi yang diterapkan oleh pemimpin.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا كَانُوا يَخْتَلَفُونَ
 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ

Artinya: “Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (Q.S.al-Baqarah: 213)”

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Agusman Hidayat(2011)	“Koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan kesehatan dikabupaten enrekang upaten enrekang “	Hasil penelitian ini menunjukan keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan di kabupaten enrekang tidak terlepas dari peran kordinasi badan perencanaan pembangunan dengan dinas kesehatan dalam perencanaan pembangunan kesehatan berupa : a). adanya rapat koordinasi,b) adanya tukar menukar informasi, c) adanya komitmen yang di bangun. Proses perencanaan pembangunan kesehatan itu penyusunan rencana, pelaksanaan program,pengawasan atas perencanaan program dan pengevaluasian ,dan itu telah berjalan cukup baik di kabupaten enrekang, menunjukan model partisipasi	Penelitian ini mengambil subjek di bidang kesehatan dan indikator penelitian ke peran koordinasi. Sedangkan penelitian saya di bidang pembangunan infrastruktur dan menggunakan indikator menurut melayu hasibuan yaitu: a). kesatuan tindakan, b). komunikasi, c). pembagian kerja, d). disiplin.
Aceng Ulumudin (2012)	“Pengaruh koordinasi terhadap manajemen proyek untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan proyek bina marga kabupaten garut”	Hasil penelitian ini salah satu penyebab yang di duga mengapa pelaksanaan proyek belum efektif adalah belum terlaksananya manajemen proyek secara baik. Hal ini tercerminnya dari adanya keterlambatan dalam pencairan anggran, keterlambatan laporan kemajuan pekerjaan, dan kurangnya pengawasan , serta kurangnya pengorganisasian proyek.	
Armansyah Matondang Dan Irwan Nasution,(2	” Analisis tugas dan fungsi BAPPEDA terhadap	Hasil penelitian ini rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahun	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
019)	pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan jangka menengah daerah”	2012-2017 telah selesai dilaksanakan, tetapi pada pelaksanaannya juga masih terdapat kendala, sehingga target dan sasaran RPJMD tidak tercapai. Salah satunya SKPK dalam penyusunan rencana kerja tidak mempedomani RPJMD dan tidak dikoordinasikan dengan Bappeda, seharusnya penyusunan rancangan kerja SKPK harus berpedoman pada RPJMD dan melakukan koordinasi dengan BAPPEDA. Sebagai koordinator dan pelaksana perencanaan pembangunan BAPPEDA memiliki peran sebagai narasumber pada pelaksana pra forum yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPK melaksanakan monitoring dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan yang dilakukan.	dan penelitian ini berfokus pada RPJMD sedangkan penelitian ini berlokasi di kota Pekanbaru dan berfokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kota Pekanbaru.
La ode mustafa dan muh yusuf,(2018)	“Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan pada badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Kedari”	Hasil penelitian ini pelaksanaan koordinasi BAPPEDA Di Kedari sudah terlaksana dengan baik. Hal ini di tinjau dari pelaksanaan koordinasi vertikal oleh kepala BAPPEDA Kota Kedari selaku pemimpin di kantor BAPPEDA telah terlaksananya koordinasi yang baik dengan walikota	Penelitian ini menganalisis ke fungsi koordinasinya di BAPPEDA, sedangkan penelitian ini menganalisis pelaksanaan koordinasi pada proyek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		kendari tentang pelaksanaan program kerja maupun program pembangunan kepada para pegawainya begitupun dengan koordinasi pelaksanaan tugas pada unit-unit kerja pada kantor di BAPPEDA telah terlaksana dengan baik, yakni adanya pengarah, penyalarsan dan menginternalkan program-program pembangunan antar SKPD Pemerintahan kota Kedari.	pembangunan infrastruktur di kota Pekanbaru.
Heni H.,Ngetje Joorie M. Ruru ,Novva N. Plangiten(2019)	“Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara”	Koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan kajian teoritis tentang koordinasi pembangunan infrastruktur jalan, dipilih empat indikator yaitu koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, dan koordinasi melalui satu forum. Koordinasi melalui kewenangan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Kao Barat sudah berjalan cukup baik, untuk kewenangan kabupaten sedangkan untuk kewenangan provinsi belum terlaksana sama sekali, untuk itu pemerintah kabupaten juga berharap agar kedepannya pemerintah provinsi bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab	Indikator penelitian ini menggunakan teori Handyaningrat (1989:119-121) yaitu: koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, dan koordinasi melalui satu forum. Sedangkan penelitian saya menggunakan indikator menurut Melayu Hasibuan(2006) yaitu: kesatuan tindakan, komunikasi,pem



- Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		sesuai yang diharapkan masyarakat kecamatan Kao Barat, Koordinasi melalui konsensus dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kao Barat harus ada kerjasama atau tindakan saling mendukung, menunjang, dan membantu pelaksanaan setiap program antar pemerintah kecamatan, SKPD, dan instansi vertikal belum berjalan secara optimal	bagian kerja, dan disiplin.

2.5 Defenisi konsep

Defenisi Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). (Soedjadi (2000:14))

Adapun batasan defenisi konsep tersebut:

- a. Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007).
- b. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan negara



akhirnya(Sondang Siagian, 2009)

2.6 Konsep Operasional

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Variabel	Indikator	Subindikator
1.	Kordinasi pelaksanaan pembangunan IPAL di kota Pekanbaru	1. Kesatuan tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua OPD memiliki peran dan tanggung jawab yang Saling ketergantungan dan menyatu dalam pelaksanaan proyek pembangunan IPAL 2. Adanya hubungan kerjaTimbal balik antara OPD yang saling berkaitan 3. setiap OPD memahami tujuan dari pembangunan IPAL dan peran /tanggung jawab yang telah di tetapkan.
		2. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap OPD memiliki tindakan informasi dalam rapat perencanaan proyek pembangunan 2. Setiap OPD melakukan Adanya tindaknya alur informasi, seperti jadwal rapat ataupun pertemuan 3. Setiap OPDmenyediakan Adanya tidaknya teknologi informasi dalam perencanaan.
		3. Pembagian kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan OPD sesuai dengan bidangnya untuk mencapai tujuan pembangunan 2. Adanya pembagian Beban kerja OPD,agar pembangunan IPAL terencana dengan baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

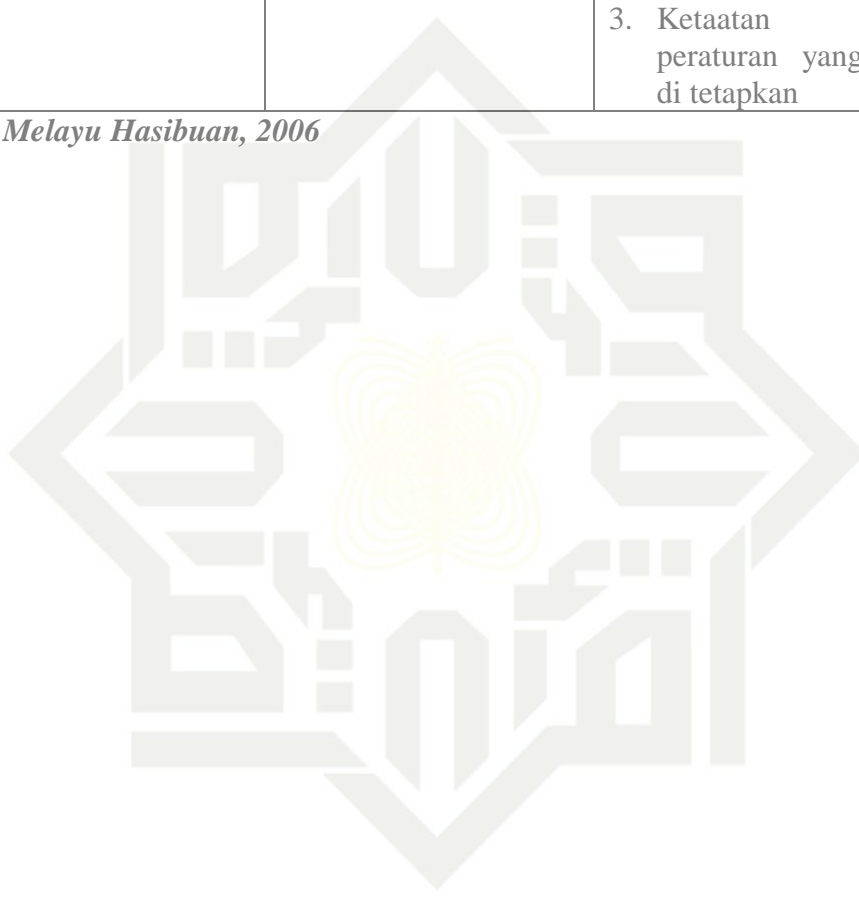
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Variabel	Indikator	Subindikator
		4. Disiplin	1. Ketepatan waktu OPD dalam pertemuan/rapat yang telah di rencanakan 2. Tanggung jawab setiap OPD untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing 3. Ketaatan dalam peraturan yang telah di tetapkan

Sumber Melayu Hasibuan, 2006



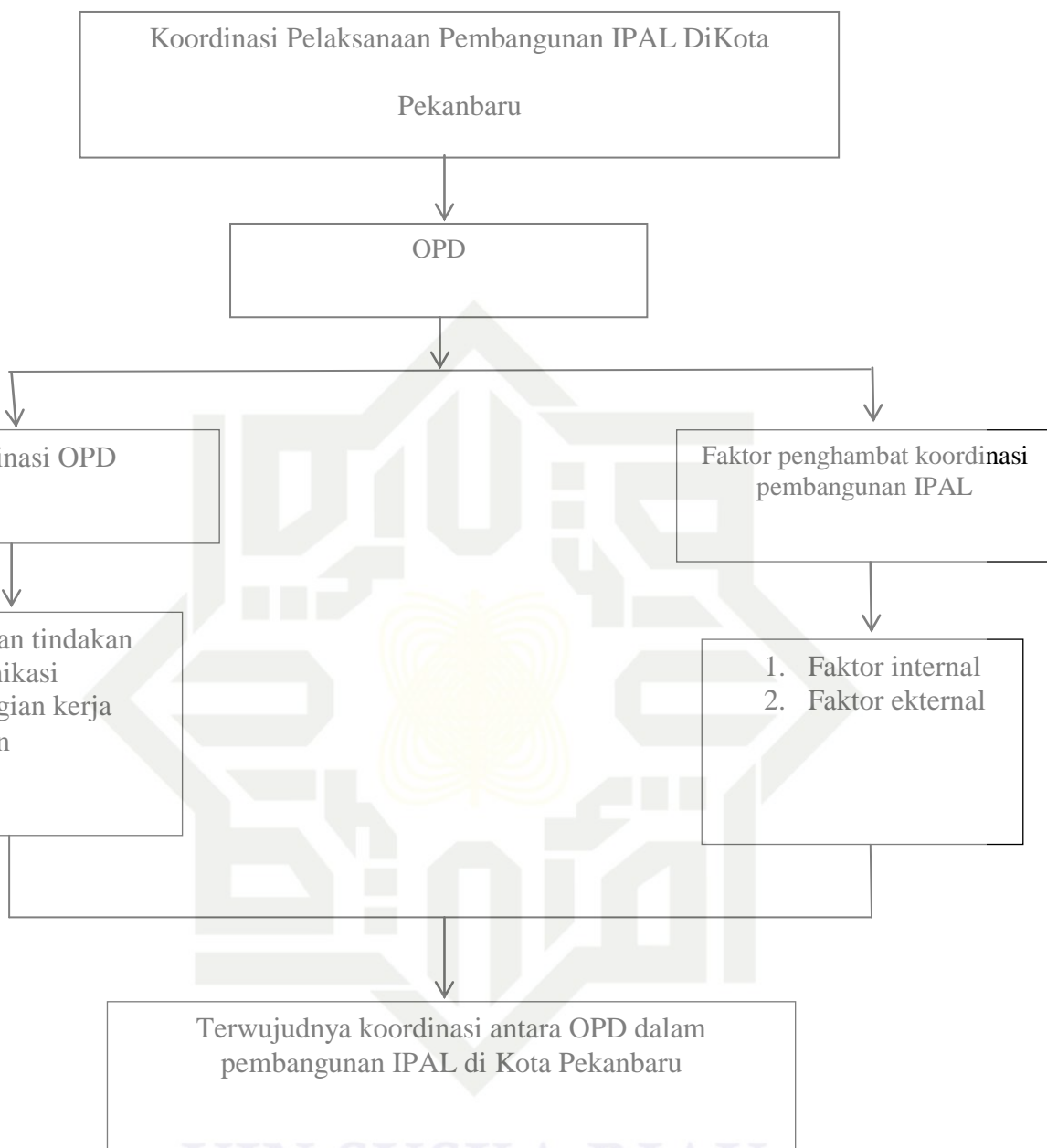
UIN SUSKA RIAU



2.7 Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Melayu Hasibuan, 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah kota pekanbaru yang terletak di jalan Jl. Badak Ujung, Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru, Gedung Utama Lt. II - Tenayan Raya pada bulan Desember 2020 sampai selesai

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, menekankan pada elaborasi interpretasi dari sebuah fenomena tanpa bergantung pada pengukuran secara numerik.

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian dibutuhkan data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai peneliti adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung oleh peneliti melalui objeknya. Data primer yang dibutuhkan peneliti adalah wawancara dengan narasumber secara langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru. Adapun data primer yang di butuhkan dalam penelitian ini :

1. Informasi pembangunan ipal



2. Koordinasi yang dilakukan OPD

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui laporan-laporan, buku-buku atau data yang diolah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

a. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung. Penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala sub bidang perekonomian dan pelaksana di bagian bidan umum yang di jadikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (key informan) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan –pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan penelitian HP, buku, dan pena.

b. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan pengindraan. Obesifikasi yang dilakukan adalah observasi langsung saat paraktek kerja lapangan di bulan januari- februari . untuk melihat bagaimana pelaksanaan koordinasi pemimpin terhadap Aparatur Sipil Negara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber- sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari kantor badan perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Subjek penelitian adalah orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek peneliti merupakan sumber informasi yang di gali untuk mengungkapkan fakta-fata di lapangan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key informen dilakukan dengan purposive sampling. seperti yang



dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan tentang objek penelitian. Informasi yang di pilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1
Informan Penelitian Ini

No	Dinas	Jabatan
1.	BAPPEDA Kota Pekanbaru	1.Kabid pengembangan dan permukiman dan prasarana wilayah 2.Kasubag permukiman dan penataan kawasan
2.	Dinas PUPR Kota Pekanbaru	Kabid cipta karya
3.	DLHK kota Pekanbaru	Kabid pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
4.	DISHUB kota Pekanbaru	Kabid manajemen dan rekayasa lalu lintas

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui koordinasi OPD Dalam perencanaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan di kota pekanbaru, penulis menggunakan teknik analisis data diskriptif kualitatif data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk table dan diberikan penjelasan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh (Burhan Bungin 2003), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Menurut (Sugiyono, 2011) mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Tahap ini merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif yang merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Display Data

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan

penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

4.1.1 Gambaran Geografis

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km², setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi menjadi 632,26 Km². Dengan bergulirnya otonomi daerah pada tahun 2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan. Demikian pula dengan Kelurahan/Desa dimekarkan menjadi 58 (dari 45 Kelurahan/Desa yang ada sebelumnya) berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003. Letak Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Siak yang membelah kota menjadi di wilayah.

Sungai Siak ini pulalah yang kemudian menjadi acuan orientasi Utara – Selatan kota, dimana wilayah di atas Sungai Siak di identifikasikan sebagai daerah Utara Kota, dan sebaliknya daerah di bawah Sungai Siak diidentifikasi sebagai daerah Selatan Kota. Secara spasial, Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. Keuntungan lokasional ini, harus dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan.

4.1.2 Jumlah Penduduk

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2000-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2020	587.842
2	2005	720.197
3	2006	754.467
4	2007	779.889
5	2008	799.213
6	2010	897.767
7	2020	1.117.605

Sumber: Wikipedia

4.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru (Bappeda)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut BAPPEDA Kota Pekanbaru merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Dasar hukum terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden (Keppres) No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di latar belakang beberapa pertimbangan yaitu dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, menjadi perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah yang lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menyeluruh, terarah dan terpadu. Selanjutnya atas dasar Keppres No. 27 Tahun 1980 menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Pekanbaru nomor 5 tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Pekanbaru. Peraturan ini bermaksud untuk memperbaharui peraturan sebelumnya sekaligus menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja yang pernah dibentuk.
 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Peraturan ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru(Bappeda)

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru, dengan dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai unit perencana di daerah, maka dirumuskan visi BAPPEDA Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Bappeda Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya dituangkan dalam Renstra-OPD. Adapun visi BAPPEDA Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis menuju Pekanbaru smartcity yang madani”.

4.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah di tetapkan undang-undang darurat No 19/1957 yang kemudian di undangkan dengan Undang-Undang No 61 tahun 1958. Provinsi Riau merupakan gabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di rantau ini, diantaranya ialah kerajaan Inderagiri (1658-1838), Kerajaan Siak (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan banyak lagi kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Saat itu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau membawahi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Permukiman. Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yaitu:

1. Undang-undang No 15 tahun 1974, tentang pokok-pokok di daerah (bagian kesebelas pasal 49) mengenai dinas daerah, yaitu:
 - a. Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembentukan susunan organisasi dan formasi dinas dengan pedoman ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
- b. Peraturan Daerah yang dimaksud ayat 2 pasal ini, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Keputusan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau.

4.3.1 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Visi Provinsi Riau untuk periode 2019-2024 dinyatakan sebagai berikut :

Vis “terwujud nya riau berdaya saing, bermartabat dan unggul”

- a. Berdaya Saing Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari
- b. Bermartabat Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan masyarakat
- c. Unggul Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan

Selanjutnya terhadap Visi Provinsi Riau dianalisis rumusan, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,



Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya di perjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

- a. Misi 1 mewujudkan sumber daya manusia yang beriman,berkualitas, dan berdaya saing global melalui pembangunan seutuhnya . sasaran dari misi 1 terselenggaranya bangunan gedung utuk kepentingan keagamaan strategi provinsi. Strategi dalam misi ini adalah merehabilitas dan memelihara sarana keagamaan startegis provinsi
- b. Misi 2 mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan,tujuan dari misi ini adalah mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata,berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- c. Misi 3 mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif,mandiri dan berdaya saing. Tujuan dari misi ini adalah untuk Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

4.4 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas danmelaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif. Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA No. 07/2001 tentang perubahan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru termasuk kedalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang di atur oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 38 tahun 2007, PP Nomor 41 tahun 2007, Perda Nomor 08 tahun 2008 dan Perwako Nomor 08 tahun 2009.

4.4.1 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: Visi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru: “Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Misi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan sistem jaringan transportasi.

4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

4.5 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat
 - b. perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat di bidang kebersihan lingkungan.

- c. Perumusan penyajian informasi pembinaan masyarakat di bidang kebersihan dan lingkungan.
 - d. Perumusan kordinasi dengan unit kerja lain dan intansi yang terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat di bidang kebersihan dan lingkungan
 - e. Merumuskan penyusunan pelaporan hasil akhir yang di capai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan,,pengawasan, dan pengendalian di bidang kebersihan dan lingkungan.
 - f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan,
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru
 - a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
 - b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
 - c. Perumusan penyajian dan informasi pembinaan masyarakat di bidang kebersihan dan lingkungan
 - d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.1 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dinas lingkungan hidup dan kebrsihan kota pekanbaru memilki Visi Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani, dan Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meciptakan lingkungan hidup yang bersih bebas sampah berbasis teknolgi ramah lingkungan
3. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
4. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka dapat di ketahui bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kota Pekanbaru sudah diimplementasikan namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat di lihat dari indikator penelitian yang meneliti 4 indikator yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin

Dalam pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Kasatuan tindakan adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dapat di simpulkan belum berjalan dengan efektif dapat kita lihat masih ada beberapa OPD yang belum memahami tugas dan peranan mereka sehingga hubungan kerja kurang berjalan secara efektif, dapat kita lihat dari masih banyak nya masalah-masalah di lapangan yang menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan IPAL dan tidak sesuai nya waktu pengerjaan pembangunan IPAL.

Untuk Komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, terutama antara OPD yang bertanggung jawab sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Di dalam pembangunan IPAL belum berjalan dengan efektif di karenakan jadwal rapat yang



tidak menetap dan masih kurang nya fasilitas komunikasi yang di berikan seperti sarana dan prasarana dalam rapat yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah(IPAL).

Sedangkan Pembagian kerja Pembagian kerja merupakan usaha dalam mengidentifikasi dan menetapkan pekerjaan atau tugas organisasional yang esensial dan aktivitas kunci untuk dikerjakan ke dalam pekerjaan yang secara logis dikerjakan oleh seorang atau kelompok, di dalam pembangunan IPAL pembagian kerja sudah sesuai dengan kemampuan di bidang yang di perlukan dalam pelaksanaan pembangunan IPAL .

Adapun Disiplin adalah suatu sikap menghargai dan menghormati, serta patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik aturan yang tertulis maupun tidak, kemudian mampu menjalankannya dengan baik dan menerima sanksi yang ada ketika melakukan pelanggaran. dalam koordinasi pembangunan IPAL masih di katakana belum baik di karenakan masih adanya OPD yang terlambat datang dalam pertemuan rapat dan masih kurang nya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang di berikan.

Faktor penghambat dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kota Pekanbaru yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya kurang nya koordinator yang tegas, kurangnya rasa tanggung jawab setiap OPD, dan kurang nya fasilitas komunikasi yang di butuhkan. Sedangkan faktor eksternal kurang nya anggaran dikarenakan covid19 dan masih banyaknya penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan IPAL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberi saran kepada organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah agar lebih mehami peran dan tanggung jawab yang diberikan, menyediakan layanan komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan lebih transparansi terhadap pelaksanaan pembangunan IPAL seperti menyediakan informasi-informasi terupdate di media social yang memudahkan masyarakat untuk lebih mengetahui pembangunan IPAL. Penting juga koordinator dalam pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) memiliki sifat yang lebih tegas agar OPD lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan peran nya masing masing sehingga terciptanya hubungan kerja yang efektif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

Al-quran surah al-saff ayat 4

Al quran surah Q.S.al-Baqarah: 213

Buku

Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Afifuddin. (2012). *Pengantar Administarasi Pembangunan*. Bandung: Bumi aksara

Hasibuan , A. D. (2007) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi aksara

Hasibuan, M. S. (2017). *Manajemn Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Kunarjo . (2002). *Perencanaan Pengendalian Program Pembangunan* . Jakarta: Ui Press.

Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Mahi, A. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Kencana: Perpustakaan Nasional.

Mangkunegara, Anwar Prabu. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Pratama, R. (2020). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Suganda, H. Dann. (2006) *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta : Intermediasi

Tarigan. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah* . Jakarta : Bumi Aksara

Warjio. (2016). *Politik Pembangunan*. Jakarta: Kencana.

Warsito , Utomo (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wijayanto, D. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

- Aceng Ulumudin. (2012). Pengaruh Koordinasi Terhadap Manajemen Proyek Untuk Mewujudkan Efektifitas Pelaksanaan Proyek Bina Marga Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 3, 1-4
- Arief Rachman. (2021). Koordinasi Pemerintahan Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2, 23-29
- Bachtiar. (2021). Fungsi Koordinasi Bappeda Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Helmerah Selatan . *Jurnal Administrasi Negara*, 12, 22-32
- Dwi Sanda Yudha. (2020). Pengaruh Koordinasi Dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 2, 5-31
- Hidayat, a. (2011). Koordinasi bappeda dalam perencanaan pembangunan kesehatan di kabupaten enrekang. *Jurnal ilmu pemerintahan*, 4, 61-69.
- Katrin Winarsih H., T. D. (2014). Analisis Koordinasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3, 1-10.
- Mahfud, M. A. (2015). Peran dan koordinasi stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan nglegok, kabupaten blitar. *Jurnal administrasi publik*, 3, 20170-2076.
- Muh Firyal Akbar. (2019). Koordinasi Publik Untuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Banjir Pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7, 63-78.
- Mustafa, I. O. (2018). Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan pada badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kota kendari. *Jurnal administrasi negara*, 4, 1-8.
- Novia Rindi. (2021). Koordinasi Stakeholder Dalam Pengawasan Kapal Wisata Di Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5, 1-8.
- Peni, A. T. (2019). Koordinasi Lingkup Organisasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kupang. *Jurnal Of Business Studies*, 2, 18-34
- Saleh, R. (2016). Koordinasi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya manusia, administrasi dan pelayanan publik*, iii, 52-59.
- Sarihati, t. (2019). Koordinasi Penertipan Instalasi Pembangunan Air Limbah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pabrik Di Kawasan Timur Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosial Dan Politik*, *Xxiv*, 1-12.

- Setiadi, I. N. (2019). Analisis Tugas Dan Fungsi BAPPEDA Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Ilmu Pemerintahan*, *7*, 35-39.
- Suminar, R. (2018). Analisis Koordinasi Antar Stakeholders Dalam Program. *Jurnal administrasi publik*, *12*, 67-74.
- Teguh Nurhayanto. (2020). Koordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *3*, 1-20
- Ulumudin, a. (2012). Pengaruh koordinasi terhadap manajemen proyek untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan proyek bina marga kabupaten garut. *Jurnal pembangunan dan kebijakan publik*, *03*, 1-4.

Peraturan Perundang Undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

DRAF WAWANCARA

1. Apakah peraturan yang mengatur tentang kebijakan pembangunan IPAL sudah jelas?
2. Dalam pembangunan IPAL apakah ada pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek IPAL?

KESATUAN TINDAKAN

1. Bagaimana hubungan kerja setiap OPD yang terkait dalam pembangunan IPAL?
2. Apakah OPD sudah memahami peran dan fungsinya dalam pembangunan IPAL?
3. Bagaimana mekanisme setiap OPD dalam melakukan kerja sama yang baik dalam pembangunan IPAL?

KOMUNIKASI

1. Bagaimana cara OPD membagikan informasi terkait dengan pembangunan IPAL?
2. Apakah jadwal rapat sudah yang telah dilakukan sudah efektif untuk menjalin komunikasi?
3. Apakah fasilitas komunikasi yang digunakan dalam pembangunan IPAL Sudah sesuai dengan kebutuhan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMBAGIAN KERJA

1. Apakah pembagian kerja OPD sudah sesuai dengan peran dan fungsinya?
2. Apakah OPD sudah menjalankan beban kerja sesuai dengan peran dan fungsinya?

DISIPLIN

1. Apakah OPD menghadiri rapat dengan tepat waktu?
2. Apakah setiap OPD sudah bertanggung jawab dalam pembagian kerja dalam pembangunan IPAL?
3. Apakah setiap OPD sudah mentaati peraturan yang telah ditentukan dalam pembangunan IPAL?

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN II

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan BAPPEDA Kota Pekanbaru



2. Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara Dengan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru



4. Wawancara Dengan Dinas PUPR Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Rindu Annisa, lahir di Rawang Lama pada 11 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara yaitu pasangan ayahanda Nurmansyah dan Ibunda Mahdaleni. Penulis menyelesaikan pendidikan di MIN Meranti di Rawang Lama (2005-2011). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri di Rawang Lama (2011-2014). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMK Pembangunan Di Bagan Batu (2014-2017). Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BAPPEDA Kota Pekanbaru dan juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa paket C Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau. Penulis melakukan penelitian ini di Kota Pekanbaru dengan Judul “Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasah (Oral Comprehensive) pada tanggal 22 Desember 2021 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Alhamdulillah dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).